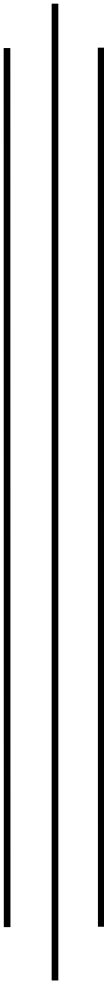


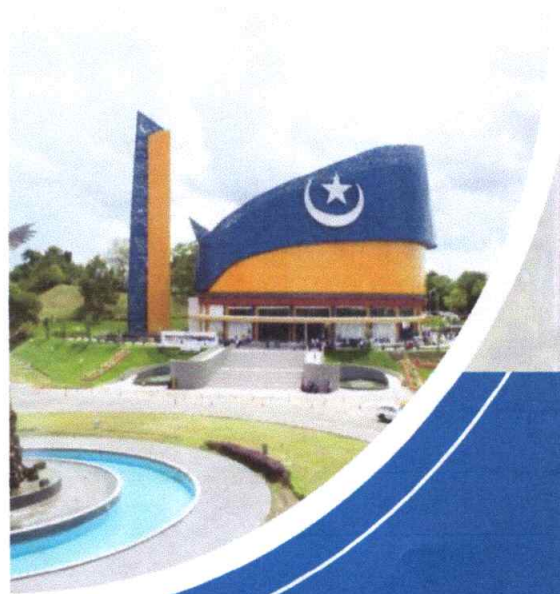
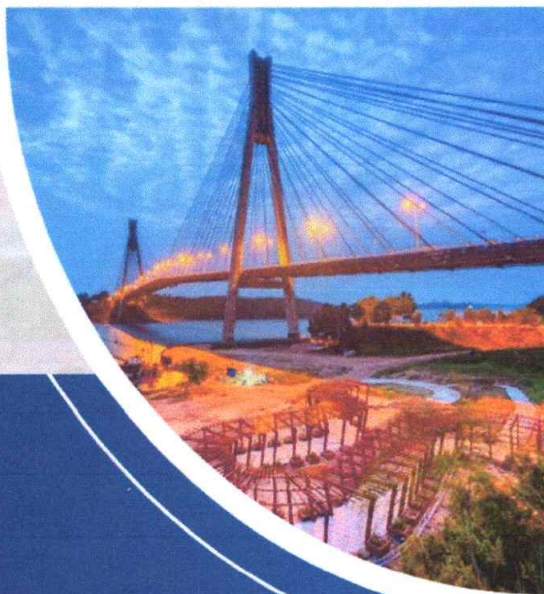
LAMPIRAN IV : PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 32 TAHUN 2026
TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2027

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2027





RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2027



JL. ENGKU PUTRI NO 1, LANTAI 6
KANTOR WALI KOTA BATAM
bappedabatam@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2027.

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang perencanaan dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2027.

Semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat dipedomani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna menyukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Batam

Batam, Juli 2026
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Batam



Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si
NIP. 197608202002121008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah	1
1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah	1
1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	2
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	 7
2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKU dan IKK Tahun 2025.....	7
2.2 Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025.....	11
2.3 Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2027	11
2.3.1 Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	11
2.3.2 Permasalahan	28
2.3.3 Kondisi Lingkungan Dinamis.....	28
2.4 Telaah pokok-pokok pikiran DPRD.....	30
2.5 Inovasi Bidang Urusan Dalam Upaya Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat.....	31
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	 32
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027....	32
3.2 Arah Kebijakan yang sudah diselaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah	33
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .	35
4.1 Rencana program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2027	35
4.2 Rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian program prioritas daerah, kontribusi terhadap pencapaian target nasional, pencapaian SPM (bagi bidang urusan terkait), dan tematik lainnya sesuai bidang urusan.....	49
 BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	 52
5.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2027.....	52
5.2 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027	53
 BAB VI PENUTUP	 55
6.1 Catatan Penting	55
6.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	56
6.3 Rencana Tindak Lanjut	56

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKU Tahun 2025 ...	9
Tabel 2.2	Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKK Tahun 2025 ...	10
Tabel 2.3	Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025	11
Tabel 2.4	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 Kota Batam	15
Tabel 2.5	Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD	30
Tabel 2.6	Inovasi Bappeda dalam Mendukung Prioritas Pembangunan.....	31
Tabel 3.1	Target Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2027.....	32
Tabel 3.2	Keselarasan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Kepulauan Riau, Prioritas Kota Batam dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2027.....	34
Tabel 4.1	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027	36
Tabel 4.2	Dukungan Program Renja Bappeda Kota Batam terhadap Prioritas Nasional	50
Tabel 4.3	Dukungan Program RKPD Kota Batam terhadap Prioritas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027.....	51
Tabel 5.1	Target Indikator Kinerja Utama Bappeda Tahun 2027 dan Target Akhir Tahun 2029	53
Tabel 5.2	Indikator Kinerja Kunci.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renja..... 2

Gambar 1.2 Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya 3

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dengan Undang-undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana pembangunan daerah.

1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah

Rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD dan RKPD sedangkan Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

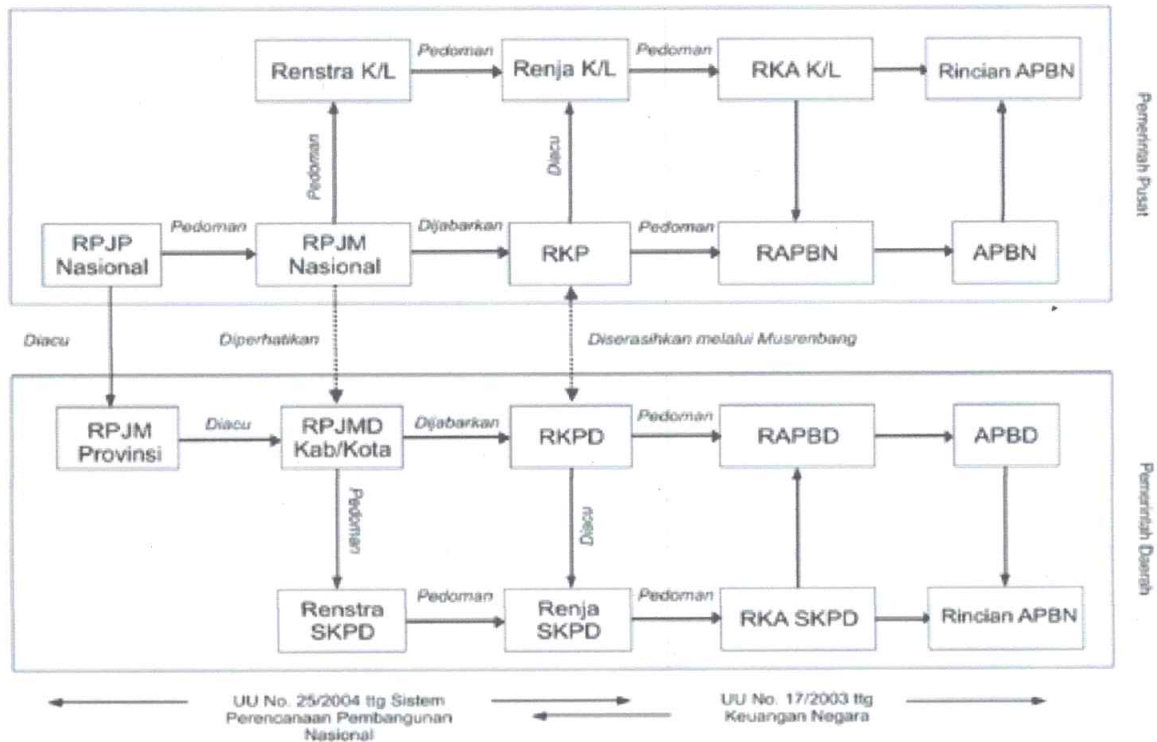
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2025-2029. Renja menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Di dalam Renja berisikan juga evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang urusan perencanaan, strategi, program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Renja disusun dengan tahapan sebagaimana tergambar pada alur sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan Renja
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja
- c. Penyusunan Rancangan Renja
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renja
- f. Penetapan Renja.

Gambar 1.2 Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

- Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
 9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 130);
 10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 136);
 11. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 23 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1363);
 12. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 58 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Kota Batam Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1628);
 13. Peraturan Walikota Batam Nomor 29 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2027 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2026 Nomor 1718).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2027 dan memberi gambaran perencanaan program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2027.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam ini adalah untuk mensinergikan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD) 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah, meliputi:

1. Latar belakang penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renja Perangkat Daerah.
2. Dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 serta disusun sesuai dengan kaidah produk hukum.
3. Maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.
4. Sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas masing-masing bab dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menjelaskan gambaran bidang urusan yang meliputi:

1. Evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa IKU dan IKK Tahun 2025 (capaian tahun pertama Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029).
2. Evaluasi capaian SPM Tahun 2023-2025 (bagi bidang urusan terkait).
3. Rumusan permasalahan dan isu strategis tahun 2027 berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2027, dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, dan kondisi lingkungan dinamis.
4. Telaah pokok-pokok pikiran DPRD.
5. Inovasi bidang urusan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan:

1. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang wajib sama dengan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penentuan target tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 membutuhkan analisa berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (target IKU/IKK dapat melebihi/berkurang dari target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029).
2. Arah kebijakan yang sudah diselaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2027, RKPD Tahun 2027, dan kebijakan nasional/daerah lainnya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan:

1. Rencana program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2027 yang disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi capaian kinerja, program, kegiatan, dan subkegiatan.
2. Dapat ditambahkan secara khusus rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian program prioritas daerah, kontribusi terhadap pencapaian target nasional, pencapaian SPM (bagi bidang urusan terkait), dan tematik lainnya sesuai bidang urusan.

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menyajikan target kinerja indikator bidang urusan yang meliputi:

1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
2. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB VI PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKU dan IKK Tahun 2025

Pengukuran kinerja Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2025 dilakukan terhadap lima Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencerminkan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Secara umum, seluruh indikator menunjukkan capaian yang sangat baik, bahkan sebagian besar telah memenuhi atau melampaui target yang ditetapkan.

Indikator pertama, **Persentase kinerja pembangunan daerah yang tercapai**, memperoleh realisasi sebesar **100%** dari target capaian **90%**, sehingga tingkat capaian mencapai **111%**. Hasil ini menunjukkan bahwa target-target pembangunan daerah yang menjadi kewenangan Bappeda secara keseluruhan dapat diwujudkan dengan sangat baik. Indikator **Persentase Kinerja Pembangunan Daerah yang Tercapai** menunjukkan kinerja yang sangat baik. Pada Tahun 2025 ditetapkan target sebesar **90 persen**, sedangkan realisasi mencapai **100 persen**, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai **111 persen** dengan kategori **Sangat Tinggi**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh indikator pembangunan daerah yang menjadi ukuran keberhasilan Bappeda telah tercapai sesuai target yang ditetapkan. Hasil ini mencerminkan efektivitas proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah serta sinergi yang baik antara Bappeda dengan perangkat daerah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan.

Meskipun demikian, target akhir Renstra Tahun 2029 masih ditetapkan sebesar **95 persen**, lebih rendah dibandingkan realisasi yang telah dicapai pada Tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa target akhir Renstra belum sepenuhnya mencerminkan tingkat kinerja aktual maupun potensi peningkatan kinerja organisasi. Oleh karena itu, **target akhir Tahun 2029 perlu dilakukan penyesuaian menjadi 100 persen** agar lebih realistis terhadap capaian yang telah diraih, tetap memberikan tantangan (*challenging*), serta mencerminkan komitmen Bappeda dalam mempertahankan kualitas kinerja pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Indikator kedua, **Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD**, berhasil mencapai **100%**, sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga tingkat capaian mencapai **100%**. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh program, kegiatan, dan indikator pembangunan yang dituangkan dalam RKPD telah selaras dengan arah kebijakan dan sasaran RPJMD. Konsistensi dokumen perencanaan tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah.

Indikator ketiga, **Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah**, mencatat realisasi sebesar **100%**, melampaui target sebesar **98,42%**, dengan tingkat capaian **102%**. Capaian ini menunjukkan semakin efektifnya pelaksanaan mekanisme partisipatif dalam proses perencanaan pembangunan, baik melalui Musrenbang maupun berbagai media konsultasi publik lainnya, sehingga aspirasi masyarakat dapat terakomodasi secara optimal.

Indikator keempat, **Persentase perangkat daerah dengan peringkat kinerja sangat tinggi**, merupakan indikator dengan peningkatan paling signifikan. Dari target sebesar **22,22%**, realisasi mencapai **62,22%**, sehingga tingkat capaian mencapai **280%**. Hasil ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada perangkat daerah, yang didukung oleh penguatan pembinaan, pendampingan, monitoring, serta evaluasi kinerja secara berkelanjutan. Meskipun demikian, dibandingkan dengan target akhir RPJPD Tahun 2029 sebesar **100%**, masih diperlukan upaya peningkatan kualitas manajemen kinerja agar semakin banyak perangkat daerah mampu mencapai kategori kinerja sangat tinggi.

Indikator kelima, **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**, memperoleh nilai **91,30** dari target **90,75**, dengan tingkat capaian **101%**. Nilai tersebut juga telah mendekati target akhir RPJPD Tahun 2029 sebesar **92**, yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan Bappeda kepada pemangku kepentingan terus mengalami peningkatan. Capaian ini mencerminkan komitmen organisasi dalam memberikan pelayanan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.

Secara keseluruhan, capaian kelima IKU menunjukkan bahwa penyelenggaraan fungsi perencanaan pembangunan daerah selama Tahun 2025 telah berjalan secara efektif. Seluruh indikator memperoleh kategori **"Sangat Tinggi"**, yang mencerminkan keberhasilan Bappeda dalam menjaga kualitas dokumen perencanaan, memperkuat partisipasi masyarakat, meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Ke depan, keberhasilan tersebut perlu dipertahankan melalui peningkatan kualitas pengendalian, evaluasi berbasis outcome, pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen kinerja, serta penguatan sinergi antar perangkat daerah guna mendukung pencapaian target pembangunan jangka menengah dan jangka panjang Kota Batam.

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKU Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian 2025	Realisasi Capaian 2025	Capaian Kinerja (%)	Status Kinerja RKPD 2025	Target Akhir 2029
1.	Persentase Kinerja pembangunan daerah yang tercapai	Persen		90%	100%	111%	Sangat Tinggi	95%
2.	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persen		100%	100%	100%	Sangat Tinggi	100%
3.	Persentase Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah	Persen		98,42%	100%	102%	Sangat Tinggi	100%
4.	Persentase PD yang peringkat kinerjanya sangat tinggi	Persen		22,22	62,22	280%	Sangat Tinggi	100%
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.	Nilai		90,75	91,30	101%	Sangat Tinggi	92

Pengukuran kinerja Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2025 juga dilakukan terhadap **Indikator Kinerja Kunci (IKK)** sebagaimana ditetapkan dalam indikator nasional urusan pemerintahan. Pada Tahun 2025, indikator yang diukur adalah **Persentase Program Prioritas Nasional yang Didukung Daerah**.

Berdasarkan hasil pengukuran, indikator tersebut memperoleh **realisasi sebesar 100%**, sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar **100%**, sehingga tingkat capaian kinerjanya mencapai **100%**. Dengan demikian, status kinerja indikator ini termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Batam melalui Bappeda telah berhasil mengintegrasikan seluruh Program Prioritas Nasional ke dalam dokumen perencanaan daerah sesuai dengan kewenangan dan karakteristik pembangunan daerah. Sinkronisasi antara kebijakan nasional dan daerah tercermin dalam penyusunan RKPD,

penganggaran, serta pelaksanaan program pembangunan yang mendukung pencapaian sasaran nasional.

Selain memenuhi target tahunan, realisasi sebesar **100%** juga telah mencapai **target akhir periode RPJPD Tahun 2025–2029**, sehingga menunjukkan konsistensi Pemerintah Kota Batam dalam mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional. Ke depan, upaya yang perlu dipertahankan adalah menjaga kualitas integrasi perencanaan, meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah, serta memastikan bahwa dukungan terhadap Program Prioritas Nasional tidak hanya terpenuhi secara administratif, tetapi juga mampu menghasilkan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, indikator kinerja kunci (IKK) "Persentase Program Prioritas Nasional yang Didukung Program Daerah" menunjukkan capaian yang sangat baik. Dari target yang ditetapkan sebesar 100 persen, realisasi yang dicapai juga sebesar 100 persen, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100 persen dengan status kinerja "Sangat Tinggi".

Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh Program Prioritas Nasional yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kota Batam telah diakomodasi dan didukung melalui program pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang berlaku. Hal ini mencerminkan adanya sinkronisasi yang baik antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyusunan serta pelaksanaan program pembangunan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini tidak terlepas dari proses perencanaan yang terintegrasi, koordinasi yang efektif antar perangkat daerah, serta komitmen dalam menjaga keselarasan antara dokumen perencanaan daerah dengan arah kebijakan nasional. Dengan capaian tersebut, target akhir periode RPJMD Tahun 2029 sebesar 100 persen tetap berada pada jalur yang tepat (on track) untuk dipertahankan hingga akhir periode perencanaan.

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKK Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian 2025	Realisasi Capaian 2025	Capaian Kinerja (%)	Status Kinerja RKPD 2025	Target Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2029)
1.	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	Persen		100%	100%	100%	Sangat Tinggi	100%

2.2. Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025

Berdasarkan hasil inventarisasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023–2025, Bappeda Kota Batam tidak memiliki indikator maupun jenis pelayanan yang menjadi kewenangan penyelenggaraan SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pada periode tersebut tidak terdapat target maupun realisasi capaian SPM yang dapat diukur dan dilaporkan. Dengan demikian, status capaian SPM Bappeda Kota Batam dinyatakan nihil.

Meskipun demikian, Bappeda Kota Batam tetap berperan dalam mendukung penyelenggaraan SPM di tingkat Pemerintah Kota Batam melalui fungsi perencanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pembangunan daerah. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyelarasan dokumen perencanaan daerah, fasilitasi koordinasi lintas perangkat daerah, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target SPM oleh perangkat daerah teknis penyelenggara urusan wajib pelayanan dasar.

Tabel 2.3 Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Realisasi		
			2023	2024	2025
		N I H I L			

2.3 Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2027

2.3.1 Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2025 meliputi 3 (tiga) hal yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan dan hasil rencana program dan kegiatan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan tahun 2025 sebagaimana Tabel 2.3 dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

- 1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu:
 - indikator rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran bidang PPM dari target 23,22 terealisasi 20,22

- indikator rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dari target 22,90 terealisasi 21,37
- indikator rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran bidang Perekonomian dan SDA dari target 22,44 terealisasi 21,81
- c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan dari target 100% realisasi 97,73%
- 2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu: indikator: Nilai SAKIP OPD target 75,21 realisasi 75,21
 - b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yaitu:
 - 1) indikator Persentase komponen masyarakat yang terlibat dalam perencanaan Pembangunan daerah dari target 100% realisasi 100%
 - 2) indikator persentase komponen masyarakat yang terlibat dalam perencanaan Pembangunan daerah dari target 100% realisasi 100%
 - c. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dari target 100% realisasi 100%
 - d. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dari target 100% realisasi 100%
 - e. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dari target 100% realisasi 100%
 - f. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dari target 100% realisasi 100%
 - g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari target 100% realisasi 100%
 - h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari target 100% realisasi 100%
 - i. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dari target 100% realisasi 100%
 - j. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dari target 100% realisasi 100%
 - k. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dari target 100% realisasi 100%
 - l. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dari target 100% realisasi 100%
 - m. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dari target 100% realisasi 100%
 - n. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dari target 100% realisasi 100%

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dari target kinerja yaitu indikator indeks Pelayanan Kesekretariatan PD target 92, realisasi 92,24
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya beberapa target indikator kinerja adalah:
 - a. Penyebab tidak tercapainya Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan PD dan perencanaan kinerja belum dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
 - b. Penyebab tidak tercapainya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah karena keterbatasan ruangan, sehingga pengadaan 1 unit lemari arsip ditunda pengadaannya sampai dengan selesainya revitalisasi rumah arsip Bappeda.
5. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya beberapa target indikator kinerja adalah:
 - a. Perencanaan yang matang dan realistis
 - b. Komitmen dan dukungan pimpinan
 - c. SDM yang cukup secara jumlah dan memiliki kompetensi sesuai tugas dan tanggung jawab
 - d. Alokasi anggaran yang memadai dan tepat waktu
 - e. Koordinasi dan kerja sama yang efektif
 - f. Lingkungan kerja yang kondusif

Faktor-faktor penyebab realisasi melebihi target pada indikator kinerja adalah meningkatnya efektivitas layanan administrasi dan dukungan manajemen, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses kesekretariatan, peningkatan kompetensi dan komitmen SDM, serta koordinasi internal dan monitoring pelayanan yang semakin optimal.

6. Implikasi yang timbul dari capaian program Renstra Bappeda terhadap capaian sasaran Bappeda adalah menunjukkan bahwa arah kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan daerah telah berada pada jalur yang tepat, sehingga berimplikasi langsung pada peningkatan capaian sasaran Bappeda, penguatan peran Bappeda sebagai motor pengendali perencanaan, serta terjaganya konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan Kota Batam dengan dokumen perencanaan perangkat daerah.
7. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah:
 - a. Terhadap indikator yang telah tercapai sesuai target: dilakukan penguatan konsistensi perencanaan dan penganggaran melalui pemeliharaan kualitas perencanaan, penajaman indikator kinerja, serta pengalokasian anggaran yang proporsional guna

menjaga keberlanjutan capaian kinerja dan mencegah penurunan kinerja pada periode berikutnya.

- b. Terhadap indikator yang belum tercapai target: dilakukan penyesuaian strategi perencanaan dan penganggaran melalui reviu target dan indikator kinerja, penguatan intervensi program/kegiatan yang berdampak langsung pada sasaran, peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta pengalokasian anggaran yang lebih fokus dan berbasis prioritas.
- c. Terhadap indikator yang melebihi target: dilakukan evaluasi atas penetapan target dan asumsi perencanaan, penajaman target kinerja pada periode berikutnya, serta replikasi praktik baik (*best practice*) dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya agar capaian kinerja tetap efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam sampai dengan tahun 2025 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan: Nilai)	84,03		73,53	75,21	102,28	77,03	77,03	100%
	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan: Nilai)	97		93	92,24	99,18	93	93	100%
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu (Dengan Satuan: Persentase)	100%		100%	100%	100,00	100%	100%	100%

1.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Dokumen)	13		3 dokumen	3 dokumen	100,00	2 dokumen	2 dokumen	100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Laporan)	11		0	0	0,00	3 dokumen	3 dokumen	100%
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan (Dengan Satuan: Persentase)	100%		100%	100%	100,00	100%	100%	100%
2.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan: Orang/ bulan)	70		58 orang/bulan	62	106,90	61 orang/bulan	62 orang/bulan	102%
3.Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Satuan: Dokumen)	72		12 Dokumen	12	100,00	12 dokumen	12 dokumen	100%
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya (Dengan Satuan: Persentase)	100%		100%	100%	100,00	100%	100%	100%
4.Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan: Orang)	130		6 orang	6 orang	100,00	12 orang	12 orang	100%

5. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	4		0	0	0,00	1 paket	0	0%
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran (Dengan Satuan: Persentase)	100%		100%	100%	100,00	100%	100%	100%
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Dengan Satuan: Paket)	6		1 paket	1 paket	100,00	1 paket	1 paket	100%
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Dengan Satuan: Paket)	54		5 paket	5 paket	100,00	4 paket	4 paket	100%
8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Dengan Satuan: Paket)	6		1 paket	1 paket	100,00	1 paket	1 paket	100%
9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Dengan Satuan: Paket)	12		2 paket	2 paket	100,00	2 paket	2 paket	100%
10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan: Laporan)	72		12 laporan	12 laporan	100,00	12 laporan	12 laporan	100%

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan (Dengan Satuan: Persentase)	100%		100%	97,73%	97,73	100%	100%	100%
11. Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	60		0	0	0,00	15 unit	15 unit	100%
12. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan (Dengan Satuan: Unit)	1		1 unit	1 unit	100,00	12 unit	12 unit	100%
13. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan (Dengan Satuan: Unit)	1		1 unit	1 unit	100,00	12 unit	12 unit	100%
14. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Dengan Satuan: Unit)	57		34 unit	41 unit	120,59	30 unit	30 unit	100%
15. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1		0	0,00	0,00	1 unit	1 unit	100%
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan (Dengan Satuan: Persentase)	100%		100%	100%	100,00	100%	100%	100%

16. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Dengan Satuan: Laporan)	72		12 laporan	12 laporan	100,00	12 laporan	12 laporan	100%
17. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Dengan Satuan: Laporan)	12		12 laporan	9 laporan	75,00	0	0	100%
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik (Dengan Satuan: Persentase)	100%		100%	100%	100,00	100%	100%	100%
18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan: Unit)	1		1 unit	1 unit	100,00	1 unit	1 unit	100%
19. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan: Unit)	5		4 unit	4 unit	100,00	4 unit	4 unit	100%
20. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Dengan	390		71 unit	71 unit	100,00	65 unit	65 unit	100%

	Satuan: Unit)								
21. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1		0	0	0,00	1 unit	1 unit	100%
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran bidang PPM (Dengan Satuan: Nilai)	25,94		20	20,22	101,10	24,03	24,03	100%
	rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Dengan Satuan: Nilai)	24,44		20	21,37	106,85	22,94	22,94	100%
	rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran Bidang perekonomian dan SDA (Dengan Satuan: Nilai)	26		20	21,81	109,05	23,71	23,71	100%
8. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Dengan Satuan: Persen)	100%		100%	100%	100,00	100%	100%	100%

22. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)	121		33 dokumen	33 dokumen	100,00	22 dokumen	22 dokumen	100%
23. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Dengan Satuan: Laporan)	1		1 laporan	1 laporan	100,00	0	0	100%
24. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Dengan Satuan: Laporan)	5		0	0	0,00	1 laporan	1 laporan	100%
25. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)	66		18 dokumen	18 dokumen	100,00	12 dokumen	12 dokumen	100%

26. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Dengan Satuan: Laporan)	2		2 laporan	2 laporan	100,00	12 laporan	12 laporan	100%
27. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Dengan Satuan: Laporan)	5		0	0	0,00	1 laporan	1 laporan	100%
9. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan perangkat daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (Dengan Satuan: Persen)	100%		100%	100%	100,00	100%	100%	100%
28. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)	77		21 dokumen	21 dokumen	100,00	14 dokumen	14 dokumen	100%

29. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Dengan Satuan: Laporan)	5		0	0	0,00	1 laporan	1 laporan	100%
30. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Perekonomian (Dengan Satuan: Laporan)	2		2 laporan	2 laporan	100,00	0	0	100%
31. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)	33		9 dokumen	9 dokumen	100,00	6 dokumen	6 dokumen	100%
32. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang SDA (Dengan Satuan: Laporan)	2		2 laporan	2 laporan	100,00	12 laporan	12 laporan	100%

33. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Dengan Satuan: Laporan)	5		0	0	0,00	1 laporan	1 laporan	100%
10. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Dengan Satuan: Persen)	100%		100%	100%	100,00	100%	100%	100%
34. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)	55		15 Dokumen	15 dokumen	100,00	10 dokumen	10 dokumen	100%
35. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Dengan Satuan: Laporan)	1		2 laporan	2 laporan	100,00	0	0	100%

36. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Dengan Satuan: Laporan)	4		0	0	0,00	1 laporan	1 laporan	100%
37. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)	143		39 dokumen	39 dokumen	100,00	26 dokumen	26 dokumen	100%
38. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Dengan Satuan: Laporan)	4		2 laporan	2 laporan	100,00	0	0	100%
39. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Dengan Satuan: Laporan)	4		0	0	0,00	1 laporan	1 laporan	100%

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan indikator program prioritas RPJMD dengan RKPD (Dengan Satuan: Persen)	100%		100%	100%	100,00	100%	100%	100%
	Persentase komponen masyarakat yang terlibat dalam perencanaan Pembangunan daerah (Dengan Satuan: Persentase)	100%		0%	100,00	#DIV/0!	100%	100%	100%
11. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase penyusunan dokumen sesuai dengan tahapan dan tepat waktu (Dengan Satuan: Persen)	100%		100%	100%	100,00	100%	100%	100%
40. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/ L i n t a s Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Berita Acara)	315		90 Berita Acara	90 Berita Acara	100,00	45 Berita/Acara	45 Berita/Acara	100%
41. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan: Berita Acara)	6		2 Berita Acara	2 Berita Acara	100,00	1 Berita/Acara	1 Berita/Acara	100%
42. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)	12		3 dokumen	3 dokumen	100,00	2 dokumen	2 dokumen	100%

12. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase analisis data dan informasi yang dimanfaatkan (Dengan Satuan: Persen)	100%		100%	100%	100,00	100%	100%	100%
43. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Dengan Satuan: Orang)	935		150 orang	150	100,00	200 orang	200 orang	100%
44. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang diterbitkan (Dengan Satuan: Buku)	1		1 Buku	1 Buku	100,00	1 buku	1 buku	100%
45. Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dengan Satuan: Dokumen)	4		0	0	0,00	1 dokumen	1 dokumen	100%
13. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persen)	100%		100%	100%	100,00	100%	100%	100%
46. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Dengan Satuan: Laporan)	13		3 laporan	3 laporan	100,00	3 laporan	3 laporan	100%

2.3.2 Permasalahan

Didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah** Kota Batam, tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja maupun kinerja pelayanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan tersebut, dapat dikategorikan dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

A. Permasalahan Internal

1. Belum optimalnya perencanaan pembangunan Kota Batam yang akuntabel, efektif dan efisien.
2. Masih kurangnya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah

B. Permasalahan Eksternal

1. Perlunya peningkatan SDM perencana di perangkat daerah;
2. Perlunya peningkatan komitmen pimpinan perangkat daerah dalam mencapai target kinerja.

2.3.3 Kondisi Lingkungan Dinamis

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perencanaan serta tugas lain yang diberikan Wali Kota.

Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
- d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan.

Analisis terhadap lingkungan internal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

a. Kekuatan (*Strength*)

1. Eksistensi Bappeda sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu: (a) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; (b) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu, maupun antara pusat dan daerah; (c) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; (d)

Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (d) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan

2. Tersedianya SDM, sarana dan prasarana serta dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi dan pelayanan Bappeda

b. Kelemahan (*weaknesses*)

1. Belum optimalnya keselarasan antara perencanaan dan penganggaran pada tingkat operasional;
2. Data dan informasi yang tersedia belum sepenuhnya bisa digunakan dan dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan khususnya untuk proses perencanaan;
3. Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan dan subkegiatan pembangunan secara berkala di tingkat perangkat daerah untuk mengarahkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan dan subkegiatan maupun sebagai *feedback* bagi perencanaan pembangunan daerah periode selanjutnya.
4. Manajemen SDM (termasuk kompetensi dan koordinasi) masih perlu ditingkatkan.

Untuk pengembangan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam terdapat beberapa **tantangan** yang harus dihadapi yaitu:

1. Faktor proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran;
2. Perubahan kebijakan nasional dalam rentang waktu yang berdekatan, berpotensi menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan daerah;
3. Terdapatnya pertentangan atau ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem perencanaan pembangunan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, sehingga berdampak terhadap kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Di samping tantangan yang dihadapi terdapat pula beberapa **peluang** yang dapat mengembangkan pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam yaitu:

1. Diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041, sebagai salah satu dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. Tuntutan dan aspirasi masyarakat yang semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang mengharuskan semuanya untuk ditampung dan diperhatikan;
3. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang menuntut pemerintah daerah untuk mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi;

4. Perubahan paradigma perencanaan pembangunan yang menuntut perencanaan sebagai fasilitator dan mediator dalam menata inisiatif masyarakat;
5. Adanya fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

2.4 Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Telaah Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD merupakan salah satu bahan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pokok-pokok pikiran tersebut pada dasarnya merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat oleh DPRD yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah serta kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan hasil inventarisasi pada Tahun 2025, tidak terdapat usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang menjadi kewenangan atau dilaksanakan oleh Bappeda Kota Batam sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tujuan akhir. Dengan demikian, tabel Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD pada Bappeda Kota Batam dinyatakan nihil.

Meskipun demikian, Bappeda Kota Batam tetap menjalankan fungsi koordinasi dalam proses pengintegrasian Pokok-Pokok Pikiran DPRD ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui fasilitasi pembahasan, verifikasi kesesuaian dengan prioritas pembangunan daerah, serta sinkronisasi dengan program dan kegiatan perangkat daerah yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti usulan tersebut. Peran tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD dapat diakomodasi secara terencana, terukur, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Tabel 2.5 Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD

No.	Pengusul	Usulan	Uraian Pekerjaan	Alamat Lokasi	Status	Volume	Satuan	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	OPD Tujuan Akhir
			N I H I L							

2.5 Inovasi Bidang Urusan Dalam Upaya Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan, Bappeda terus mengembangkan berbagai inovasi yang berorientasi pada peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan. Pengembangan inovasi dilakukan sebagai respons terhadap berbagai permasalahan dalam tata kelola perencanaan dan pengendalian pembangunan, khususnya terkait kebutuhan akan sistem informasi yang terintegrasi, cepat, dan berbasis data. Inovasi yang dikembangkan tidak hanya mendukung optimalisasi proses bisnis internal, tetapi juga memperkuat pengambilan keputusan melalui penyediaan informasi yang akurat dan real time. Dengan demikian, inovasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada pemangku kepentingan sekaligus mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah. Adapun inovasi yang telah dikembangkan Bappeda beserta manfaat, outcome, dan indikator kinerja yang didukung disajikan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6 Inovasi Bappeda dalam Mendukung Prioritas Pembangunan

Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintahan	Inovasi	Jenis	Permasalahan	Manfaat	Outcome	Indikator yang Didukung
Prioritas 3: Penguatan Inklusi Sosial Untuk Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan dan Adil	Perencanaan	Semenanjung 2.0	Digital	Monitoring pembangunan belum terintegrasi	Monitoring real time	Pengendalian pembangunan lebih efektif	Persentase Program Tepat Waktu
		E-Monev	Digital	Evaluasi pembangunan masih manual	Monitoring berbasis data	Kinerja OPD meningkat	Nilai SAKIP

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah **“Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Kinerja Pembangunan Daerah”**.

Sedangkan sasaran dalam mencapai tujuan tersebut mengacu pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya perencanaan yang partisipatif, selaras dan transparan;
- b. Meningkatnya Kualitas perencanaan dan Pengendalian Kinerja Perangkat Daerah;
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Tahun 2025, secara umum seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Batam menunjukkan capaian yang baik bahkan melampaui target yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2025. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam penyesuaian target pada Renstra Perubahan Tahun 2027 agar lebih realistis, menantang, dan tetap mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Tabel 3.1 Target Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2027

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2027
2	3	4	8
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian kinerja pembangunan daerah		Persentase Kinerja pembangunan daerah yang tercapai	100,00%
	Terwujudnya Perencanaan yang Partisipatif, Selaras, dan Transparan.	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100%
		Persentase Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah	100,00%
	Meningkatnya Kualitas perencanaan dan Pengendalian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase PD yang peringkat kinerjanya sangat tinggi	70,00%
	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	92,75

3.2 Arah Kebijakan Yang Sudah Diselaraskan Dengan Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan peningkatan akuntabilitas kinerja daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025–2029, Bappeda menetapkan arah kebijakan yang berfokus pada penguatan fungsi perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, adaptif, dan berbasis kinerja. Arah kebijakan ini disusun sebagai penjabaran dari kebijakan RPJMD yang menekankan peningkatan pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel melalui kolaborasi antarinstansi.

Implementasi arah kebijakan tersebut diwujudkan melalui beberapa strategi utama. Pertama, **merumuskan kebijakan daerah yang partisipatif**, sehingga setiap dokumen perencanaan mampu menjawab kebutuhan pembangunan berdasarkan kondisi dan potensi daerah serta aspirasi masyarakat. Kedua, **meningkatkan kualitas proses penyusunan aspirasi masyarakat** sebagai bagian dari perencanaan pembangunan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan.

Selanjutnya, Bappeda mengarahkan kebijakan pada **peningkatan kinerja perangkat daerah** melalui penguatan peran Bappeda sebagai koordinator dan pengendali perencanaan pembangunan. Upaya ini dilakukan dengan memastikan setiap perangkat daerah memiliki keterkaitan yang kuat antara tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja sehingga selaras dengan target pembangunan daerah.

Untuk mendukung efektivitas tata kelola perencanaan, dilakukan pula **penguatan pemanfaatan teknologi informasi** melalui pengembangan sistem informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan yang terintegrasi. Pemanfaatan teknologi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas data, mempercepat proses koordinasi, serta mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti (*evidence-based planning*).

Di sisi sumber daya, arah kebijakan juga diarahkan pada **peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana** melalui pengembangan kompetensi, peningkatan kemampuan analitis, serta penguasaan metode dan instrumen perencanaan yang sesuai dengan dinamika pembangunan. Penguatan kapasitas SDM menjadi faktor penting dalam menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas dan implementatif.

Selain itu, Bappeda akan **memperkuat koordinasi lintas sektor** melalui pembentukan forum koordinasi yang efektif antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Forum ini menjadi wadah untuk menyelaraskan kebijakan, menyelesaikan permasalahan pembangunan secara terpadu, serta memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan.

Dalam menghadapi dinamika pembangunan yang semakin kompleks, Bappeda juga mendorong **inovasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah**, baik melalui pemanfaatan teknologi digital, pendekatan analisis berbasis data, maupun penerapan praktik-praktik terbaik (*best practices*) dalam penyusunan kebijakan. Inovasi tersebut

diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan perencanaan sekaligus mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Terakhir, arah kebijakan difokuskan pada **peningkatan keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan RPJMD dan RKPD**. Keselarasan ini menjadi prasyarat penting untuk memastikan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan Kota Batam, sehingga akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Tabel 3.2 Keselarasan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Kepulauan Riau, Prioritas Kota Batam dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2027

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota Batam	Arah Kebijakan Perangkat Daerah
PN 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		P3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil	1. Merumuskan kebijakan daerah terkait partisipasi masyarakat
			2. Memfasilitasi penyaluran aspirasi masyarakat
			3. Meningkatkan kinerja PD dalam memetakan urgensi permasalahan di tengah masyarakat.
			4. Meningkatkan infrastruktur teknologi informasi.
			5. Meningkatkan kapasitas SDM perencanaan.
			6. Pembentukan forum koordinasi sektoral
			7. Meningkatkan inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah
			8. Meningkatkan keselarasan dokumen perencanaan PD dengan berpedoman pada RPJMD dan RPJPD.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Program, Kegiatan Dan Subkegiatan Tahun 2027

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam pada perencanaan tahun 2027 memasuki tahun ke-3 Renstra Tahun 2025-2029. Adapun rencana kerja untuk mendukung tugas dan fungsi serta merealisasikan tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam untuk Tahun 2027 dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, 13 (tiga belas) kegiatan, 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan beserta usulan pendanaan (pagu indikatif) tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				24.649.235.263							22.785.020.173			
5	01				PERENCANAAN				24.649.235.263							22.785.020.173			
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				24.649.235.263							22.785.020.173			
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN D A E R A H KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD	82,03	78.03 Nilai	20.988.646.453							80,03	20.101.044.001	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	96	94 Nilai								95		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu		100 Persentase	380.899.600							100	178.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	01	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	111.366.800	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta M e m p e r k u a t Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi , dan Penyelundupan		-Prioritas Kota B a t a m 3 . P e n g u a t a n inklusi sosial u n t u k mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil	Pemerintah Kota	2	95.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

5	01	01	2,01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3 Laporan	269.532.800	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta M e m p e r k u a t Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, J u d i , dan Penyelundupan		-Prioritas Kota B a t a m 3. P e n g u a t a n inklusi sosial u n t u k mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		Pemerintah Kota	2	83.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan		100 Persentase	16.037.080.000								100	17.046.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		68 Orang/bulan	16.000.000.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta M e m p e r k u a t Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, J u d i , dan Penyelundupan		-Prioritas Kota B a t a m 3. P e n g u a t a n inklusi sosial u n t u k mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		Pemerintah Kota	70	17.000.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2,02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	37.080.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta M e m p e r k u a t Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, J u d i , dan Penyelundupan		-Prioritas Kota B a t a m 3. P e n g u a t a n inklusi sosial u n t u k mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		Pemerintah Kota	12	46.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2,05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya		100 Persentase	492.025.600								100	218.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

5	01	01	2,05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	45.433.600	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta M e m p e r k u a t Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, J u d i , dan Penyelundupan		-Prioritas Kota B a t a m 3. P e n g u a t a n inklusi sosial u n t u k mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		Pemerintah Kota	1	58.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2,05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		25 Orang	446.592.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta M e m p e r k u a t Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, J u d i , dan Penyelundupan		-Prioritas Kota B a t a m 3. P e n g u a t a n inklusi sosial u n t u k mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		Pemerintah Kota	25	160.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran		1 0 0 Persentase	850.268.200								100	1.688.847.200	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	11.451.500	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta M e m p e r k u a t Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, J u d i , dan Penyelundupan		-Prioritas Kota B a t a m 3. P e n g u a t a n inklusi sosial u n t u k mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		Pemerintah Kota	1	23.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

5	01	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		9 Paket	268.490.600	Kecamatan Batam Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta M e m p e r k u a t Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, J u d i , dan Penyelundupan		-Prioritas Kota B a t a m 3. P e n g u a t a n inklusi sosial u n t u k mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		Pemerintah Kota	9	380.423.600	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	68.178.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta M e m p e r k u a t Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, J u d i , dan Penyelundupan		-Prioritas Kota B a t a m 3. P e n g u a t a n inklusi sosial u n t u k mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		Pemerintah Kota	1	370.423.600	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	75.263.100	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta M e m p e r k u a t Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, J u d i , dan Penyelundupan		-Prioritas Kota B a t a m 3. P e n g u a t a n inklusi sosial u n t u k mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		Pemerintah Kota	2	115.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	426.885.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta M e m p e r k u a t Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,		-Prioritas Kota B a t a m 3. P e n g u a t a n inklusi sosial u n t u k mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		Pemerintah Kota	12	800.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

												Narkoba, Judi dan Penyelundupan							
5	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan		100 Persentase	2.501.007.253							100	620.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	01	01	2,07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		15 Unit	58.847.952	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta M e m p e r k u a t Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi , dan Penyelundupan		-Prioritas Kota B a t a m 3 . P e n g u a t a n inklusi sosial u n t u k mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		Pemerintah Kota	15	120.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2,07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		10 Unit	70.408.301	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta M e m p e r k u a t Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi , dan Penyelundupan		-Prioritas Kota B a t a m 3 . P e n g u a t a n inklusi sosial u n t u k mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		Pemerintah Kota	8	500.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2,07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	2.371.751.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta M e m p e r k u a t Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi		-Prioritas Kota B a t a m 3 . P e n g u a t a n inklusi sosial u n t u k mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		Pemerintah Kota Batam	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

5	01	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		5 Unit	155.360.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil	Pemerintah Kota	5	243.272.800	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		65 Unit	53.720.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil	Pemerintah Kota	65	59.324.001	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	429.093.800	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil	Pemerintah Kota Batam	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan indikator program prioritas RPJMD dengan RKPD	100	100 Persen	2.867.624.800							100	1.940.288.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Persentase komponen masyarakat yang terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah	100	100 Persentase								100		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

5	01	02	2,01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase penyusunan dokumen sesuai dengan tahapan dan tepat waktu		100 Persen	2.369.450.800							100	1.100.641.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2,01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		45 Berita Acara	49.590.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta M e m p e r k u a t Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, J u d i , dan Penyelundupan	-Prioritas Kota B a t a m 3. P e n g u a t a n inklusi sosial u n t u k mewujudkan pembangunan y a n g berkelanjutan dan adil		Pemerintah Kota	45	110.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2,01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota		1 Berita Acara	893.222.800	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta M e m p e r k u a t Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, J u d i , dan Penyelundupan	-Prioritas Kota B a t a m 3. P e n g u a t a n inklusi sosial u n t u k mewujudkan pembangunan y a n g berkelanjutan dan adil		Pemerintah Kota Batam	1	680.641.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2,01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen P e r e n c a n a a n Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang D i t e t a p k a n (RPJPD/RPJMD/RKPD)		3 Dokumen	1.426.638.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta M e m p e r k u a t Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, J u d i , dan Penyelundupan	-Prioritas Kota B a t a m 3. P e n g u a t a n inklusi sosial u n t u k mewujudkan pembangunan y a n g berkelanjutan dan adil		Pemerintah Kota Batam	2	310.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2,02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase analisis data dan informasi yang dimanfaatkan		100 Persen	428.702.000							100	782.345.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

5	01	02	2,02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)		1 Dokumen	190.214.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		Pemerintah Kota Batam	1	400.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2,02	0002	Pembinaan dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi		245 Orang	238.488.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		Pemerintah Kota Batam	245	382.345.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2,03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti		100 Persen	69.472.000								100	57.302.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2,03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan		2 Laporan	69.472.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		Pemerintah Kota Batam	2	57.302.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran bidang PPM	25,94	24,88 Nilai	792.964.010								25,31	743.688.172	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

						rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran Bidang perekonomian dan SDA	25,62	24,56 Nilai								24,99		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	24,44	23,44 Nilai								23,94		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2,01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		100 Persen	87.126.500							100	148.584.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2,01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		22 Dokumen	1.719.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta M e m p e r k u a t Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, J u d i , dan Penyelundupan		-Prioritas Kota B a t a m 3. P e n g u a t a n inklusi sosial u n t u k mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil	Pemerintah Kota Batam	22	10.384.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2,01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		1 Laporan	10.779.800	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta M e m p e r k u a t Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, J u d i , dan Penyelundupan		-Prioritas Kota B a t a m 3. P e n g u a t a n inklusi sosial u n t u k mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil	Pemerintah Kota Batam	1	35.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

5	01	03	2,01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		12 Dokumen	30.210.600	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		Pemerintah Kota Batam	12	13.200.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2,01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		1 Laporan	44.417.100	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		Pemerintah Kota Batam	1	90.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2,02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan perangkat daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		100 Persen	377.587.910								100	249.273.310	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2,02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		14 Dokumen	61.620.460	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		Pemerintah Kota Batam	14	67.782.506	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

5	01	03	2,02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		1 Laporan	78.302.950	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta M e m p e r k u a t Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, J u d i , dan Penyelundupan		-Prioritas Kota B a t a m 3. P e n g u a t a n inklusi sosial u n t u k mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		Pemerintah Kota Batam	1	86.133.245	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2,02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen P e r e n c a n a a n Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		6 Dokumen	203.334.200	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta M e m p e r k u a t Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, J u d i , dan Penyelundupan		-Prioritas Kota B a t a m 3. P e n g u a t a n inklusi sosial u n t u k mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		Pemerintah Kota Batam	6	42.103.886	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2,02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		1 Laporan	34.330.300	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta M e m p e r k u a t Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, J u d i , dan Penyelundupan		-Prioritas Kota B a t a m 3. P e n g u a t a n inklusi sosial u n t u k mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		Pemerintah Kota Batam	1	53.253.673	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2,03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		100 Persen	328.249.600								100	345.830.862	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

5	01	03	2,03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		10 Dokumen	102.535.400	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		Pemerintah Kota Batam	10	90.187.900	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2,03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		1 Laporan	142.466.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		Pemerintah Kota Batam	1	70.432.661	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2,03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		26 Dokumen	33.910.400	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		Pemerintah Kota Batam	26	107.836.300	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2,03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		1 Laporan	49.337.800	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		Pemerintah Kota Batam	1	77.374.001	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

												Narkoba, Judi dan Penyelundupan							
					TOTAL:					24.649.235.263		22.785.020.173							

4.2 Rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian program prioritas daerah, kontribusi terhadap pencapaian target nasional, pencapaian SPM (bagi bidang urusan terkait), dan tematik lainnya sesuai bidang urusan

Pencapaian sasaran pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan, Bappeda Kota Batam berperan dalam memastikan bahwa program dan kegiatan yang disusun selaras dengan Prioritas Nasional, sehingga tercipta sinergi antara kebijakan pusat dan daerah. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan program yang berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Prioritas Nasional, disertai dengan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung implementasinya. Adapun keterkaitan antara program Renja Bappeda Kota Batam Tahun 2027 dengan Prioritas Nasional beserta alokasi pagunya disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Dukungan Program Renja Bappeda Kota Batam terhadap Prioritas Nasional

Prioritas Nasional	Dukungan Program Renja Bappeda Kota Batam Tahun 2027	Pagu 2027
Prioritas Nasional 7 : Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	2,867,624,800.00
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	792,964,010.00

Penyusunan Renja Bappeda Kota Batam Tahun 2027 tidak hanya memperhatikan keselarasan dengan kebijakan pembangunan nasional, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. Sinkronisasi ini penting untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan antar tingkatan pemerintahan sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap pencapaian sasaran pembangunan provinsi. Dalam menjalankan fungsi perencanaan, pengendalian, evaluasi, serta koordinasi pembangunan daerah, Bappeda Kota Batam berperan dalam mendukung Prioritas Provinsi melalui program-program yang memperkuat kualitas tata kelola pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia. Adapun bentuk dukungan program beserta alokasi pagu anggaran Tahun 2027 terhadap Prioritas Provinsi Kepulauan Riau disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Dukungan Program RKPD Kota Batam terhadap Prioritas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027

Prioritas Provinsi	Dukungan Program Renja Bappeda Kota Batam Tahun 2027	Pagu 2027
Prioritas 3 Pengembangan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Perluasan Pemanfaatan Teknologi Informasi, serta Pelestarian Budaya Melayu	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	2,867,624,800.00
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	792,964,010.00

BAB V

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan urusan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Batam Tahun 2027 diwujudkan melalui indikator kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Indikator kinerja tersebut disusun sebagai dasar pengukuran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2027

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Tahun 2027 disusun sebagai tolok ukur pencapaian kinerja organisasi dalam mendukung terwujudnya sasaran strategis perangkat daerah. Penetapan target dilakukan dengan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya, potensi peningkatan kinerja, serta arah kebijakan dan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Tahun 2025–2029.

Indikator **Persentase Kinerja Pembangunan Daerah yang Tercapai** menunjukkan peningkatan yang signifikan. Target Renstra Tahun 2025 sebesar **90 persen** berhasil direalisasikan sebesar **100 persen**. Atas dasar capaian tersebut, target Tahun 2027 disesuaikan menjadi **100 persen** untuk mempertahankan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah secara optimal.

Indikator **Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD** telah mencapai target secara penuh, yaitu **100 persen**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyusunan RKPD telah selaras dengan arah kebijakan, sasaran, program, dan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD. Oleh karena itu, target Tahun 2027 tetap dipertahankan sebesar **100 persen** sebagai bentuk komitmen menjaga konsistensi dokumen perencanaan.

Pada indikator **Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah**, realisasi Tahun 2025 mencapai **100 persen**, lebih tinggi dibandingkan target Renstra sebesar **98,42 persen**. Capaian ini mencerminkan semakin optimalnya pelaksanaan mekanisme partisipatif dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Dengan mempertimbangkan hasil tersebut, target Tahun 2027 ditetapkan sebesar **100 persen** agar kualitas dan cakupan partisipasi masyarakat tetap terjaga. Indikator **Persentase Perangkat Daerah yang Peringkat Kinerjanya Sangat Tinggi** menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Dari target Renstra Tahun 2025 sebesar **22,22 persen**, realisasi yang dicapai mencapai **62,22 persen**. Capaian tersebut mengindikasikan semakin meningkatnya kualitas implementasi manajemen kinerja pada perangkat daerah. Oleh karena itu, target Tahun 2027 dinaikkan menjadi **70 persen** sebagai bentuk dorongan untuk terus meningkatkan jumlah perangkat daerah yang memperoleh kategori kinerja sangat tinggi.

Sementara itu, **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah** terealisasi sebesar **91,30**, melampaui target Renstra Tahun 2025 sebesar **90,75**. Pencapaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan Bappeda telah memenuhi harapan masyarakat. Sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, target Tahun 2027 disesuaikan menjadi **92,75**.

Secara keseluruhan, penyesuaian target Tahun 2027 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja Tahun 2025 dengan mempertimbangkan tingkat ketercapaian masing-masing indikator, kapasitas organisasi, serta arah kebijakan pembangunan daerah. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan target kinerja yang lebih adaptif, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta pencapaian hasil pembangunan yang berkelanjutan, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.1 Target Indikator Kinerja Utama Bappeda Tahun 2027 dan Target Akhir Tahun 2029

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2025	Target 2027	Target Akhir 2029
1.	Persentase Kinerja pembangunan daerah yang tercapai	Persen	100	100	100
2.	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persen	100	100	100
3.	Persentase Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100
4.	Persentase PD yang peringkat kinerjanya sangat tinggi	Persen	62,22	70	85
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.	Nilai	91,3	92,75	95

5.2 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, Bappeda menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai ukuran kontribusi perangkat daerah terhadap prioritas nasional yang diimplementasikan melalui program pembangunan daerah. Target Tahun 2027 disusun berdasarkan capaian kinerja Tahun 2025 dan diarahkan untuk mempertahankan tingkat kinerja yang telah mencapai target

maksimal. Rincian target Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 sebagaimana tercantum pada Tabel 5.2 menjadi acuan dalam pelaksanaan dan evaluasi kinerja Bappeda selama tahun perencanaan.

Tabel 5.2 Indikator Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2025	Target 2027
1.	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	Persen	100%	100%

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam pada Tahun 2027 khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya, serta didasarkan pada lintas program melalui mekanisme yang partisipatif, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Batam yang menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam.

Sebagai dokumen rencana resmi daerah, diharapkan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2027 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparaturnya pelaksana program/kegiatan dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarnya.

6.1 Catatan Penting

Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2027 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2027 dan berpedoman pada Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 serta berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2027, perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029.

Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2027 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2027 terdiri atas 3 (tiga) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan. Dokumen Renja ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2027.

Jika dalam proses perkembangannya pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya perubahan seperti: kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah, dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dasar Perubahan RKPD Tahun 2027, maka akan dilakukan perubahan Renja Tahun 2027.

6.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029, yang di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan Tahun 2027 yang dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMN, RKPD Provinsi, RPJPD Kota, RPJMD Kota, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD Kota Batam.
2. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang menjadi dasar dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN.

6.3 Rencana Tindak Lanjut

Program dan kegiatan pada Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2027 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku;
2. Peningkatan pemahaman dan komitmen seluruh aparatur Pemerintah Kota Batam terhadap perencanaan dan pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2027 dengan efektif dan efisien;
3. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks dengan upaya melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur baik melalui luring maupun daring;
4. Dalam menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam, maka seluruh aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2027.

Demikian Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2027 yang telah kami susun, semoga dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam dalam pelayanan perencanaan pembangunan daerah.

WALI KOTA BATAM



AMSAKAR ACHMAD